



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6422-6440

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Efektivitas Dana Desa Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Inklusi Sosial Secara Berkelanjutan Pada Desa Nelayan Tradisional Di Kabupaten Takalar

Arman Kamal^{1✉}, Syamsul Bakhtiar ASS², Juliana Susanti³

(1,3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara,

(2) Universitas Muslim Maros

Email: armankamal87@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Saat ini angka kemiskinan ekstrem di Indonesia berada di wilayah pesisir. Fakta bahwa Indonesia adalah negara maritim justru berbanding terbalik dengan kemiskinan di wilayah pesisir. Ditengah proses pemulihan pasca Covid-19, pemerintah berkomitmen menurunkan kemiskinan ekstrem, melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dilakukan melalui pendekatan baru yang lebih inklusif yaitu Blue Economy Development. Agar dapat terlaksana dengan baik maka partisipasi dan kerjasama pemerintah desa melalui dana desa dengan melibatkan masyarakat secara inklusif harus dipastikan berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial berkelanjutan pada masyarakat desa nelayan tradisional di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain Sequential explanatory design. Sebanyak 72 responden untuk analisis kuantitatif dan 20 responden wawancara dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan pemerintah melalui dana desa belum efektif mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Inklusi sosial, Dana Desa, Nelayan tradisional*

Abstract

Currently, the extreme poverty rate in Indonesia is in coastal areas. The fact that Indonesia is a maritime country is inversely proportional to poverty in coastal areas. In the midst of the post-Covid-19 recovery process, the government is committed to reducing extreme poverty, through the Sustainable Development Goals (SDGs) program to eradicate extreme poverty by 2030. The government's efforts to reduce poverty are carried out through a new, more inclusive approach, namely Blue Economy Development. In order for this to be implemented well, village government participation and cooperation through village funds by involving the community in an inclusive manner must be ensured to be effective. This research aims to determine the effectiveness of village funds in reducing poverty and increasing sustainable social inclusion in traditional fishing village communities in Takalar Regency. This research uses a mixed method approach with a sequential explanatory design. A total of 72 respondents for quantitative analysis and 20 interview respondents were collected. The research results show that government activities through village funds have not been effective in reducing poverty and increasing social inclusion.

Keywords: *Poverty, Social Inclusion, Village Funds, Traditional Fishermen*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta km² dengan garis pantai 95.181 km (Chis, 2022). Fakta tersebut seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan sumberdaya alam potensial bagi kemakmuran rakyatnya, khususnya yang tinggal di pesisir. Namun ironisnya, tingkat kemiskinan masyarakat pesisir masih sangat mengkhawatirkan dengan tingkat *poverty headcount index* (PHI) mencapai 9,57% (Badan Pusat Statistik, 2023).

Besarnya potensi kekayaan laut di Indonesia berbanding terbalik dengan kesejahteraan para nelayan yang bermukim di wilayah pesisir. Wilayah pesisir justru menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem di Indonesia. Wilayah pesisir yang secara geografis berada di dekat laut justru sebagian besar masyarakatnya berada dalam kubangan kemiskinan. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 12,5% dari total penduduk miskin di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang sebesar 2,4% (Indraswari, 2023).

Terdapat beberapa persoalan yang menghambat kesejahteraan kaum nelayan dan menjadi penyebab kemiskinan. Pertama, mayoritas nelayan masih merupakan nelayan tradisional. Kedua, tingkat Pendidikan rendah dan bahkan buta huruf. Ketiga, armada penangkapan masih tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

rendah. Keempat, terdapat ketimpangan pemanfaatan ikan, *over fishing* dan pencurian ikan. Kelima, BBM, alat tangkap, mesin kapal dan perbekalan serta logistik untuk melaut harganya mahal dan sulit dijangkau nelayan tradisional. Keenam, Penanganan pasca panen hasil tangkapan ikan sejak dari kapal sampai ke tempat pendaratan ikan masih buruk. Ketujuh, Perubahan alam dan fluktuasi harga pasar dan ketergantungan nelayan terhadap pemilik modal.

Pembangunan saat ini masih banyak menerapkan model pembangunan eksklusif. Masih terdapat potensi eksklusi sosial atau marginalisasi sosial yang melemahkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Eksklusi sosial dianggap sebagai upaya yang menjadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak bisa ikut berperan dalam kehidupan sosial (Kronauer, 2019). Kelompok yang mengalami eksklusi sosial dinamai kelompok rentan. Kelompok rentan, antara lain perempuan, penduduk miskin, serta penyandang disabilitas (Bappenas, 2022). Baik kelompok rentan ataupun marginal bisa diartikan sebagai kelompok yang tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya, informasi (Shaw et al., 2020). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan pemerintah desa untuk meningkatkan inklusi sosial. Inklusi sosial adalah proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Seda et al., 2023). Alasan inilah yang menyebabkan pentingnya eksplorasi efektifitas dana desa agar menuju kepada pengurangan kemiskinan dan peningkatan inklusi sosial secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana efektifitas dana desa dalam meningkatkan inklusi sosial berkelanjutan pada masyarakat desa nelayan di Kabupaten Takalar.

Penelitian sebelumnya mayoritas mengevaluasi dampak dana desa terhadap penanggulangan kemiskinan, misalnya (Arfiansyah, 2020), (Yanuar et al., 2021), (Normasyhuri et al., 2022), (Nawawi et al., 2020), (Hermawan et al., 2021), (Oktavia & Wihastuti, 2020), (Yang et al., 2020), (Mora-Rivera & García-Mora, 2021), (Arifin et al., 2020), (Guo et al., 2022), (Gassner et al., 2019) dan inklusi sosial dalam pembangunan (Appau et al., 2019). Sedangkan penelitian ini mengeksplorasi efektifitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial sekaligus. Penelitian serupa masih jarang ditemui, khususnya pada komunitas desa nelayan. Mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hanya mengukur efektifitas menggunakan rasio realisasi anggaran dan target anggaran dana desa. Pendekatan seperti ini belum cukup untuk menilai dampak efektivitas dana desa secara komprehensif dan mendalam. Terdapat pula beberapa penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan prosedur wawancara dan observasi, namun saat ini sangat penting dilakukan

pendekatan lain yang lebih baik. Olehnya itu penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* yang lebih efektif dalam mencari solusi permasalahan penelitian.

Dana Desa dan Pengurangan Kemiskinan

Efektivitas pemanfaatan dana desa adalah jalan keluar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial. Pemerintah pusat telah memfasilitasi pemerintah desa dengan dana desa ditengah berbagai hambatan seperti korupsi dana desa (Kamal et al., 2019), kurangnya kompetensi dan profesionalisme pengawas pemerintah (Kamal, 2022). Tema sentral kebijakan pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat marjinal baik dari pola pikir maupun keterampilannya untuk mencari nafkah (Salim & Drenth, 2020). Pemberdayaan telah menjadi instrument penting dalam perencanaan pembangunan maupun upaya penanggulangan kemiskinan (Moeis et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat 1 memberikan amanat bahwa *"Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.* Secara eksplisit peraturan ini mengamanahkan pengembangan desa secara inklusif melalui belanja dana desa. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan dampak belanja pemerintah terhadap pengurangan kemiskinan. (Taruno, 2019) menunjukkan belanja publik untuk sektor kesehatan dan pendidikan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di pedesaan, meningkatkan kesejahteraan sosial (Leventi et al., 2019), memberi dukungan kepastian pasar bagi produk UKM (Nursini, 2020). Penelitian (Zhou et al., 2021) menunjukkan bahwa bantuan kesehatan telah banyak berkontribusi pada pengentasan kemiskinan penduduk pedesaan di China.

Dana Desa dan Inklusi Sosial

Pembangunan yang inklusif saat ini menjadi agenda utama dan pertimbangan penting dalam pembangunan nasional. (Bili & Ra'is, 2019) mengatakan Undang-Undang Desa, bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan mendorong keterlibatan masyarakat. Inklusi sosial dapat diwujudkan jika penduduk desa dilibatkan kedalam pembangunan desa, dengan begitu marginalisasi bisa terkikis dengan sendirinya (Pranoto et al., 2022), (Gutama & Widiyahseno, 2020). Selain itu, dukungan akses layanan keuangan formal oleh pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal (Omar & Inaba, 2020). Program bantuan langsung tunai mendorong kepercayaan pada pemerintah desa dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (Evans

et al., 2019).

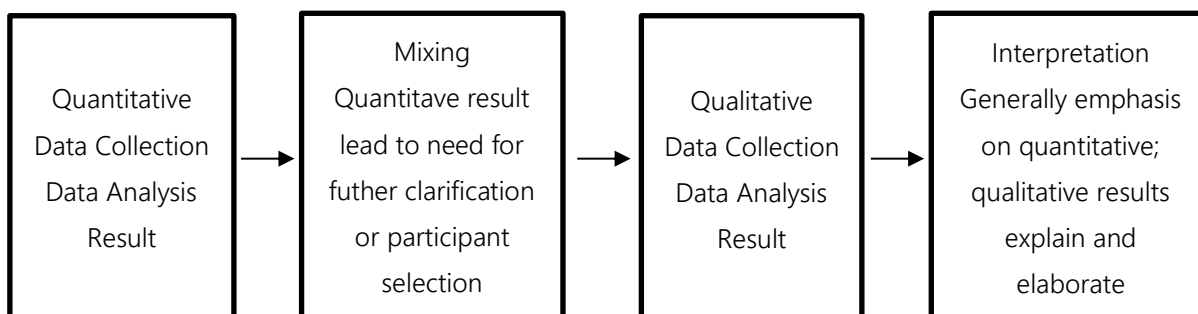
METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial secara berkelanjutan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi selatan. Wilayah Kabupaten Takalar sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores, menjadikan Takalar memiliki daerah pesisir pantai sepanjang 74 Km. Pesisir pantai ini meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sandrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar mempunyai 10 Kecamatan dengan 76 Desa dan 24 Kelurahan. Terdapat 58 desa dan kelurahan yang berada disekitar pesisir Pantai dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan. Jumlah penduduk Kabupaten Takalar sebanyak 305.077 orang di tahun 2022, dengan tingkat pengangguran 3.94% dari 149.881 orang Angkatan kerja. Jumlah penduduk miskin sekitar 24,74 ribu jiwa dengan persentase 8,25% dari jumlah penduduk (BPS Kabupaten Takalar, 2023).

Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* yaitu menggabungkan unsur-unsur desain penelitian kuantitatif dan kualitatif kedalam satu penelitian (Creswell & Hirose, 2019). Keunggulan *mixed method* yaitu memungkinkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang kompleks dan menguatkan hasil penelitian (Harrison et al., 2020). Desain yang digunakan adalah *Sequential explanatory design* dengan kerangka sebagai berikut.



Source: (Creswell & Hirose, 2019)

Gambar 1. *Sequential Explanatory Design*

Instrumen pengumpulan data

Kuisisioner penelitian dikembangkan dengan pertanyaan untuk data kuantitatif dan kualitatif guna mengumpulkan pemahaman tentang efektifitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan peningkatan inklusi sosial berkelanjutan. Untuk data kuantitatif, penelitian menggunakan indikator yang digunakan (Rusman et al., 2020) untuk efektivitas dana desa. Dilakukan perubahan kecil pada kuesioner pada serangkaian pertanyaan agar lebih relevan. Item pengurangan kemiskinan pada kuisisioner berusaha menilai efektifitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan item inklusi sosial berfokus pada penilaian peningkatan pengembangan Desa Inklusi melalui penggunaan dana desa. Ukuran ini berdasarkan (Republik Indonesia, 2014), Pasal 3 mengenai pengembangan desa inklusi.

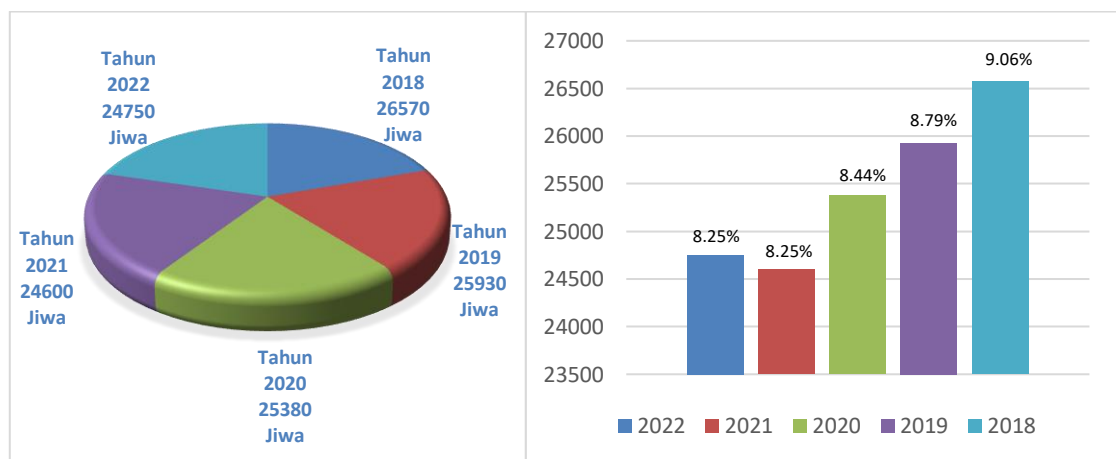
Metode analisis

Aspek penelitian kuantitatif diterapkan dengan survey menggunakan kuesioner terbuka. Sebanyak 72 responden dipilih menggunakan teknik *snowball sampling* (Parker et al., 2019) dengan pertimbangan sulitnya menjangkau masyarakat nelayan tradisional yang memahami program atau kegiatan desa yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat nelayan tradisional. Teknik ini dijalankan dengan cara responden yang ada memberikan rujukan untuk merekrut responden berikutnya yang diperlukan untuk penelitian. Kuesioner diberikan kepada nelayan tradisional pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara. Data demografis dan data yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan inklusi sosial juga dikumpulkan. Selanjutnya, metode kualitatif dari desain ini berfokus untuk memperoleh sudut pandang peserta dalam kaitannya dengan topik yang sedang dibahas yang memungkinkan untuk mengumpulkan informasi mendalam (Sharma & Kumar, 2022). *Purposive sampling* digunakan untuk memilih 20 partisipan wawancara mendalam untuk mendapatkan data kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bertahap sesuai tabel 1. Partisipan wawancara diseleksi dari survey kuantitatif yang memberikan penjelasan menarik berdasarkan pertanyaan kuisisioner terbuka. Analisis data kuantitatif akan menggunakan software SPSS dan statistik deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data kualitatif dianalisis menggunakan N-Vivo dengan analisis isi tematik (Soratto et al., 2020). Data yang diperoleh dari lapangan ditranskrip dan diberi kode. Kategori kemudian dihasilkan dari data yang dikodekan dimana tema yang berulang dan muncul diidentifikasi dan disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan

Wilayah Kabupaten Takalar sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores, menjadikan Takalar memiliki daerah pesisir pantai sepanjang 74 Km. Pesisir pantai ini meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sandrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar mempunyai 10 Kecamatan dengan 76 Desa dan 24 Kelurahan. Terdapat 58 desa dan kelurahan yang berada disekitar pesisir Pantai dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan. Jumlah penduduk Kabupaten Takalar sebanyak 305.077 orang di tahun 2022, dengan tingkat pengangguran 3.94% dari 149.881 orang Angkatan kerja. Berikut data kemiskinan kabupaten Takalar.



Gambar 2. Jumlah Dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Takalar 2018-2022

Sumber: BPS Kab.Takalar, 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat 1 memberikan amanat bahwa "Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan secara struktural merupakan jenis kemiskinan di mana terjadi karena tidak berfungsinya dengan baik sistem sosial yang bisa memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat yang dikategorikan miskin untuk bisa mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki bahkan dengan jalan mempelajarinya.

Ketidakmampuan mereka dalam mengelola sumber daya alam dikarenakan kurangnya dukungan dan sarana yang bisa menolong mereka lewat bantuan dan kebijakan

yang menjadi harapan masyarakat miskin. Kemiskinan struktural bisa dikatakan disebabkan oleh berbagai kebijakan yang diberikan akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak seimbang, kesempatan yang tidak sama serta keikutsertaan masyarakatnya dalam program kebijakan yang tidak merata. Beberapa penyebab kemiskinan secara struktural, seperti perahu bukan milik sendiri. Nelayan kecil hanya mampu membeli jala sendiri, sedangkan perahu masih meminjam karena keterbatasan modal untuk memiliki perahu sendiri. Oleh karena itu, untuk pembagian hasil harus dibagi dengan pemilik perahu.

Efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan

Efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Efektivitas Dana Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan

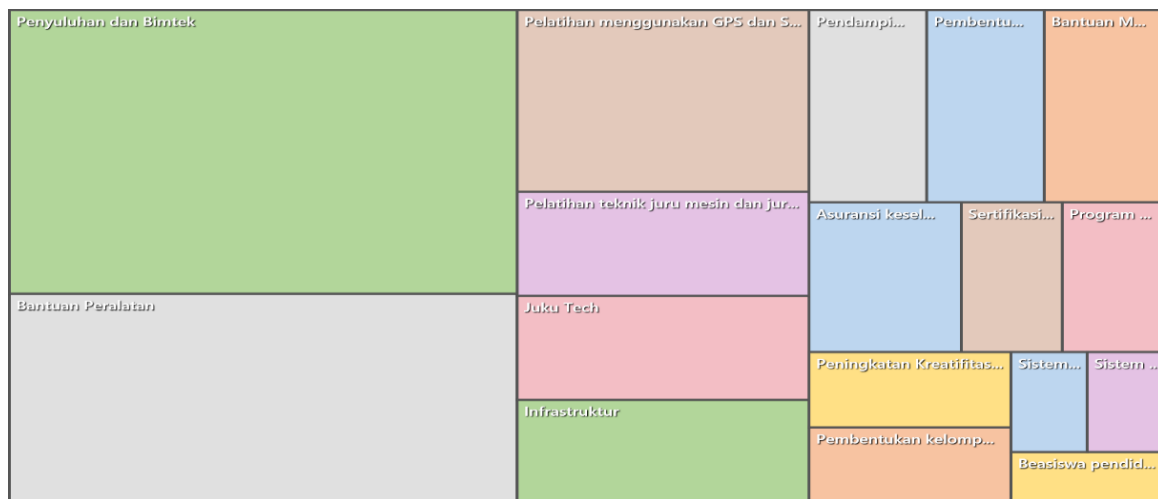
No.	Uraian	Sangat Efektif		Efektif		Kurang Efektif		Tidak Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Dampak pembangunan sarana pelelangan ikan	37	51.38	35	48.61	-	0	-	0	72	100
2.	Pemberian bantuan peralatan	48	66.66	15	20.83	6	8.33	3	4.16	72	100
3.	Pembentukan kelompok nelayan	35	48.61	26	36.11	6	8.33	5	6.94	72	100
4.	Pelatihan atau bimbingan teknis	62	86.11	4	5.55	4	5.55	2	2.77	72	100

Aktivitas pemerintah desa yang paling banyak berdampak pada pengurangan kemiskinan berdasarkan jawaban responden adalah kegiatan pelatihan atau bimtek. Sebanyak 86.11% responden memberikan jawaban bahwa kegiatan ini sangat efektif mengurangi kemiskinan. Sedangkan aktivitas yang paling sedikit berkontribusi adalah pembentukan kelompok nelayan. Secara berurutan, kegiatan pemerintah desa yang efektif mengurangi kemiskinan adalah pelatihan atau bimbingan teknis, bantuan peralatan, sarana pelelangan ikan dan pembentukan kelompok nelayan.

Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam tentang efektivitas penggunaan dana desa oleh pemerintah desa untuk mengurangi kemiskinan pada masyarakat di desa nelayan maka dilakukan analisis data kualitatif menggunakan aplikasi NVivo. Analisis data diawali dengan analisis frekuensi kemunculan kata atau *word cloud* sebagaimana yang divisualisasikan pada Gambar 3.



Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Takalar telah mengacu pada peraturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Pemberdayaan masyarakat nelayan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa peningkatan produktivitas nelayan, peningkatan peran kelembagaan lokal, dan konservasi sumber daya ikan merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas nelayan. Untuk mengetahui program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa yang paling sering dilaksanakan sebagai upaya pengurangan kemiskinan maka digunakan *hierarchy chart* NVivo seperti ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. *Hierarchy Chart* Program Pemberdayaan Untuk Pengurangan Kemiskinan

Melalui fitur ini, diketahui bahwa program yang paling utama dalam pengurangan kemiskinan nelayan adalah program penyuluhan dan bimbingan teknis. Di Desa Tamasaju pemerintah desa bersama dengan dinas kelautan telah melakukan upaya peningkatan produktivitas masyarakat nelayan melalui penyuluhan dan bimbingan teknis. Pemerintah desa bekerjasama dengan dinas kelautan dan perikanan rutin melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi nelayan. Bimbingan teknis bertujuan memberi bimbingan kepada setiap anggota kelompok mengenai pembudidayaan ikan, pengetahuan yang lebih dalam dalam mengelolah hasil perikanan dan penanganan ikan secara tepat baik itu pra maupun pasca penangkapan. Bimbingan teknis rutin dilaksanakan empat kali dalam setahun di setiap desa. Melalui program pelatihan pendapatan hasil perikanan masyarakat nelayan semakin meningkat. Bahkan terdapat program sertifikasi nelayan yang bertujuan untuk mengangkat profesi nelayan sebagai pekerja yang diakui secara nasional maupun internasional.

Program penyuluhan juga memberikan pemahaman dan membuka kesadaran masyarakat nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Masyarakat juga diberikan pendampingan tata cara dan prosedur pengurusan dokumen izin pada Dinas perikanan dan kelautan dan Kantor Syahbandar. Masyarakat juga dilatih menggunakan peralatan dengan teknologi modern seperti GPS dan Spinder. Pelatihan menggunakan GPS bertujuan agar masyarakat nelayan bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan lebih baik. Para nelayan tradisional yang menerima bantuan GPS merasakan dampak penggunaannya. Mereka mengakui bahwa setelah menggunakan GPS, hasil tangkapan mereka meningkat karena GPS memberikan informasi tentang daerah yang berpotensi. Tidak hanya itu nelayan yang menggunakan GPS juga rela memberikan informasi daerah yang potensial kepada kelompok nelayan lain yang belum menggunakan GPS.

Di Desa Sampulungan program pemerintah desa yang merangkul kementerian kelautan dan perikanan memberikan sosialisasi penangkapan ikan dan izin berlayar. Program pemerintah ini memberikan pengetahuan kepada nelayan tradisional tentang bagaimana menangkap ikan diluar dari wilayah desa dan bagaimana memperoleh izin penangkapan. Nelayan juga diberikan sosialisasi untuk menambah wawasan atau pemahaman dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut dan demi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Program bantuan peralatan merupakan program kedua berdasarkan analisis *Hierarchy chart*. Masih terdapat banyak nelayan di Desa Tamasaju yang menggunakan tehnik dan alat tangkap ikan tradisional dan kurang efisien. Mereka pergi menangkap ikan tanpa mengetahui lokasi mana yang menjadi tempat terbaik dan banyak ikan. Sehingga mereka harus berkeliling di laut dan menghabiskan banyak bahan bakar. Pemerintah Kabupaten Takalar telah memberikan bantuan teknologi berupa prototipe perangkat berbasis *mikro intel* bernama *Juku Tech*. Alat ini bertujuan membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapan ikan. Perangkat juku tech berfungsi bagi nelayan untuk menangkap ikan dengan lebih efektif dan efisien karena nelayan tidak perlu pergi kelaut begitu jauh untuk menangkap ikan.

Pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat nelayan dengan menggunakan sebagian dana desa bersama dengan bantuan dari pemerintah pusat untuk memenuhi perlengkapan nelayan agar memiliki hasil tangkapan yang lebih banyak dari biasanya. Di Desa Sampulungan pemerintah desa memberikan bantuan berupa alat kepada kelompok Nelayan. Peralatan nelayan yang diberikan di Desa Sampulungan terdiri dari mesin kapal, jaring ikan, GPS dan baju pelampung. Berdasarkan informasi, masih banyak nelayan yang menggunakan mesin kapal yang sudah tua, sehingga sering macet saat dioperasikan. Mesin yang sudah tua ini tidak mampu lagi menempuh jarak yang jauh. Akibatnya nelayan tradisional akan kalah produktivitas dengan nelayan modern sehingga tanpa perhatian pemerintah mereka tetap akan berkubang dengan kemiskinan dan menjadi kelompok nelayan yang tereksklusif. Pemerintah juga telah memberikan bantuan GPS yang sangat membantu nelayan mengetahui titik wilayah yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Meskipun bantuan GPS telah ada, namun nelayan masih kurang paham bagaimana menggunakan alat tersebut, sehingga hanya beberapa nelayan yang mampu menggunakan alat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat pesisir oleh pemerintah desa juga ditempuh dengan cara membentuk kelompok nelayan. Sejak tahun 2005 telah dibentuk beberapa kelompok nelayan di Desa Tamasaju seperti nelayan pesisir jaring gembung, KUB nelayan jaring

mandiri, nelayan pukat layang, anak nelayan rawai, nelayan mandiri, bina nelayan dan keluarga nelayan. Rata-rata setiap kelompok nelayan berangotakan 10-20 orang nelayan. Selain kelompok nelayan penangkap ikan, juga dibentuk kelompok nelayan pengelola ikan yang semuanya adalah berasal dari para istri nelayan. Kelompok ini dibentuk agar dapat memberdayakan para perempuan atau istri nelayan agar dapat berpenghasilan sendiri, serta memperkenalkan olahan hasil tangkapan ikan kepada masyarakat. Masyarakat telah sadar pentingnya kelembagaan, selain sebagai wadah bersosialisasi, keberadaan kelompok ini juga membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan. Selain itu akses ke pemberi modal seperti perbankan ataupun mitra menjadi terbuka.

Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Inklusi Sosial

Pembangunan desa dituangkan didalam Undang-Undang Desa yang dijelaskan pada pasal 78 ayat 1 yang menyatakan: Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Inklusi sosial adalah salah satu tujuan yang dibawa dalam Undang-Undang Desa, yang memiliki arah untuk membuat kemiskinan berakhir, mendorong kebersamaan masyarakat dalam kemakmuran dan menstimulasi keterlibatan segenap warga desa dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat marginal terbagi menjadi tiga dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi politik dan dimensi kemudahan fisik. Dimensi ekonomi merupakan kondisi masyarakat marginal yang disebabkan oleh kondisi dimana masyarakat tidak memperoleh pekerjaan karena tidak memenuhi syarat mendapatkan pekerjaan, misalnya pengetahuan dan tingkat pendidikan. Dimensi politik dan administrasi publik, merupakan masyarakat marginal yang tidak terlibat kedalam politik dan kesulitan mendapatkan bantuan kebijakan pemerintah. Sedangkan dimensi kemudahan fisik merupakan kondisi masyarakat marginal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan akses terhadap bantuan teknologi, komunikasi, kesehatan, listrik, pendidikan, air bersih serta layanan lainnya.

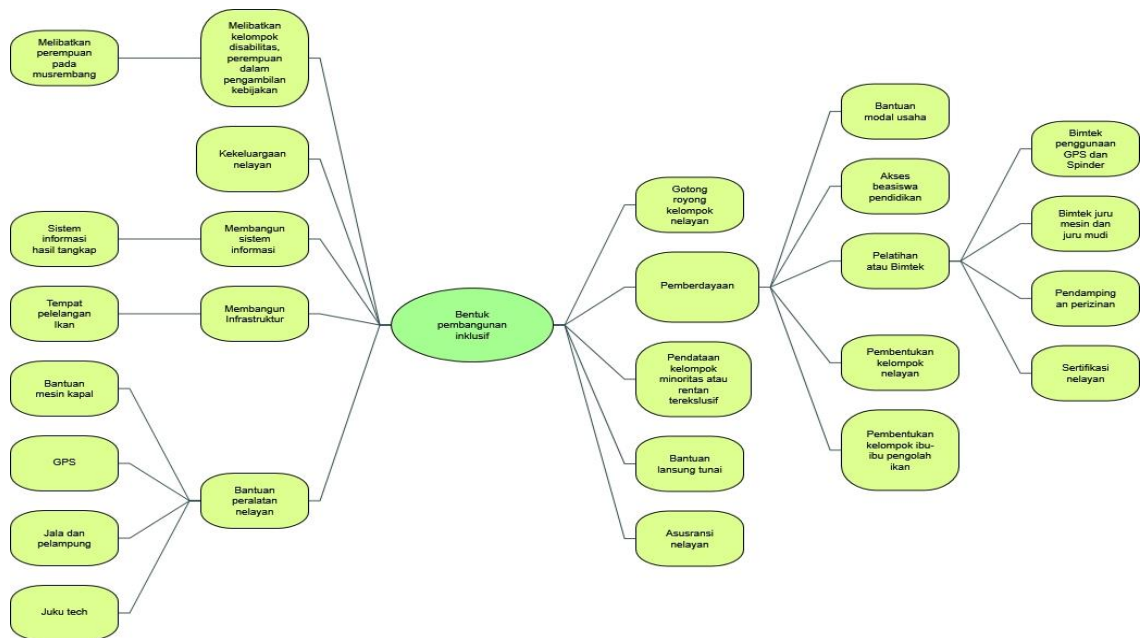
Analisis data kuantitatif menggunakan jawaban dari responden mengenai efektivitas dana desa dalam meningkatkan inklusi sosial ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan

No.	Uraian	Sangat Efektif		Efektif		Kurang Efektif		Tidak Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Keterlibatan masyarakat marginal pada kegiatan pembangunan	26	36.11	37	51.38	6	8.33	3	4.16	72	100
2.	Pemberdayaan mampu meningkatkan kemampuan dan daya bagi masyarakat marginal	64	88.88	4	5.55	4	5.55	-	0	72	100
3.	Pembentukan kelompok nelayan yang meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa	53	73.61	11	15.27	7	9.72	1	1.38	72	100
4.	Kegiatan pelatihan bagi perempuan	55	76.38	10	13.88	5	6.94	2	2.77	72	100
5.	Pelibatan kelompok perempuan pada musrembang dan penetapan RKP Desa	37	51.38	8	11.11	23	31.94	4	5.55	72	100
6.	Pendataan masyarakat miskin atau marginal	45	62.50	5	6.94	17	23.61	5	6.94	72	100

Berdasarkan tabel 2, kegiatan pemberdayaan efektif meningkatkan kemampuan dan daya bagi masyarakat marginal dengan persentase responden sebanyak 88.88%. Sedangkan pelibatan masyarakat marginal pada kegiatan pembangunan dianggap masih rendah dengan respon sebanyak 36.11%. Secara berurutan, efektivitas dana desa melalui kegiatan pemerintah desa terwujud melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan, pelatihan khusus perempuan, peningkatan inklusi melalui pembentukan kelompok nelayan, pendataan masyarakat miskin dan golongan marginal atau rawan tereksklusi, pelibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Hasil visualisasi data peningkatan inklusi sosial melalui program-program yang didanai oleh dana desa ditunjukkan menggunakan fitur *mind map* pada gambar 5.



Gambar 5. *Mind Map* Bentuk Pembangunan Inklusif

Berbagai bentuk program pembangunan desa dianalisis untuk menemukan program yang memiliki nilai-nilai inklusi sosial dalam pelaksanaannya. *Mind map* pada gambar 4, menunjukkan bentuk kegiatan terprogram yang didanai oleh dana desa seperti bantuan peralatan nelayan, pembangunan infrastruktur, sistem informasi, melibatkan kelompok perempuan dan disabilitas dalam proses perencanaan serta pembangunan, gotong royong, pemberdayaan, melakukan pendataan kelompok rawan terekslusi, program BLT, program jaminan asuransi nelayan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan yang bermukim di pesisir pantai seperti masyarakat desa Tamasaju, Desa Aeng Batu, Desa Sampulungan, Desa Tamalate, Desa Biringkassi, Desa Laikang, Desa Boddia dan Desa Pa'lalakkang dapat dimaknai sebagai pembangunan inklusif. Karena kegiatan pemberdayaan membentuk dan mendorong kemandirian nelayan tradisional melalui peningkatan sumber daya manusia lewat bantuan pembinaan dan bimbingan teknis. Segala bentuk kegiatan pemberdayaan yang merupakan program tahunan desa nelayan sejalan dengan konsep inklusi sosial yang meningkatkan kemampuan dan daya bagi masyarakat marginal.

Partisipasi masyarakat melalui program kegiatan pemerintah desa merupakan wujud dari inklusi sosial. Melalui keikutsertaan nelayan pada kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan pemberian bantuan seperti mesin kapal, jala ikan dan pelampung mendorong masyarakat yang rawan terekslusi berperan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan menjadi subjek pembangunan desa. Kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi masyarakat nelayan mendorong munculnya kembali semangat gotong royong yang merupakan spirit masyarakat tradisional yang telah ada turun temurun. Informasi dari warga

Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, mengatakan bahwa melalui bantuan pemerintah tercipta dorongan tolong menolong dan saling membantu misalnya saat mengecat perahu jolloro. Program pemerintah desa melalui bimbingan teknis bagi perempuan yaitu istri nelayan tentang pengelolaan ikan, juga menjadikan hubungan kekeluargaan dalam rumah tangga nelayan semakin meningkat. Karena para istri nelayan dapat membantu suami untuk mengolah dan menjual ikan dipasar pelelangan. Bahkan di Desa Tamasaju kecamatan Galesong utara, pemerintah desa telah mendorong keterlibatan kelompok perempuan untuk ikut berpartisipasi pada musrembang penetapan RKP Desa dan dipublikasikan di website Desa.

Hambatan Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Inklusi Sosial

Penggunaan dana desa memang merupakan senjata utama pemerintah desa untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun tidak serta merta pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang inklusif dapat terwujud. Masih banyak hambatan yang menjadi penyebab program-program belanja dana desa tidak berfungsi dan tumpul memberantas kemiskinan serta tidak mendorong inklusif sosial. Hasil wawancara dengan masyarakat nelayan tentang berbagai hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya program pemerintah divisualisasikan dalam bentuk *mind map* pada gambar 6.



Gambar 6. *Mind Map* Hambatan Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Inklusi Sosial

SIMPULAN

Amanah UU Desa sebagai regulasi bagi pemerintah desa dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan adalah mewujudkan pengurangan kemiskinan sekaligus meningkatkan inklusi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial di masyarakat nelayan Kabupaten Takalar. Analisis kuantitatif menunjukkan kegiatan

pelatihan atau bimbingan teknis merupakan kegiatan pemerintah yang paling efektif dibanding dengan kegiatan lainnya. Sedangkan hasil analisis kualitatif dengan fitur word cloud memperlihatkan bahwa kata pemberdayaan merupakan kata yang paling sering muncul dari semua transkrip wawancara. Salah satu bentuk pemberdayaan yang paling sering dilaksanakan adalah pelatihan. Analisis hierarchy chart juga menunjukkan peranan penting pelatihan dan bimbingan teknis sebagai aktivitas utama pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan.

Analisis kuantitatif membuktikan aktivitas pemberdayaan nelayan efektif mendorong inklusi melalui pelibatan masyarakat. Namun pada aktivitas pembangunan, kaum marginal belum memiliki peran yang besar. Hal ini menjadi poin penting bagi pemerintah desa. Pelibatan perempuan pada kegiatan perencanaan pembangunan juga belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Hanya satu desa nelayan yang mempublikasikan pelibatan perempuan pada musrembang melalui website desa. Mengingat perempuan selalu masuk sebagai golongan rawan terklusi, maka pelibatan perempuan pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wajib menjadi perhatian pemerintah desa.

Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan di desa nelayan Kabupaten Takalar melalui dana desa belum efektif mengurangi kemiskinan dan mendorong inklusi. Berbagai hambatan Pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong inklusi diantaranya rendahnya pemahaman nelayan, penggunaan peralatan yang mayoritas tradisional, teknologi belum mampu dimaksimalkan penggunaannya oleh nelayan, partisipasi masyarakat yang rendah pada kegiatan pemerintah serta hierarki status didalam profesi nelayan yang sampai sekarang solusi pemerintah belum menyentuh poin-poin krusial dari masalah sebenarnya. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan konsep penelitian ini dengan wilayah survei yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Appau, S., Churchill, S. A., & Farrell, L. (2019). Social integration and subjective wellbeing. *Applied Economics*, 51(16), 1748–1761.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 91–106.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., & Ariutama, G. A. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394.

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023 Statistical Yearbook of Indonesia 2023* (Direktorat Diseminasi Statistik (ed.); 1101001st ed.). Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.
- Bappenas. (2022). *Kajian Cepat Program Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dari Kelompok Rentan Secara Sosial*. Bappenas.Go.Id. <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/635/f64/bb5/635f64bb530d1829652950.pdf>
- Bili, S. R., & Ra'is, D. U. (2019). Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3).
- BPS Kabupaten Takalar. (2023). *Kabupaten Takalar Dalam Angka. Takalar Regency in Figures 2023* (BPS Kabupaten Takalar (ed.)). BPS Kabupaten Takalar.
- Chis. (2022). *Poros Maritim Jadi Kunci Kedaulatan Laut Indonesia*. Uksw.Edu. https://www.uksw.edu/detail_post/news/poros-maritim-jadi-kunci-kedaulatan-laut-indonesia
- Creswell, J. W., & Hirose, M. (2019). Mixed methods and survey research in family medicine and community health. *Family Medicine and Community Health*, 7(2).
- Evans, D. K., Holtemeyer, B., & Kosec, K. (2019). Cash transfers increase trust in local government. *World Development*, 114, 138–155.
- Gassner, A., Harris, D., Mausach, K., Terheggen, A., Lopes, C., Finlayson, R. F., & Dobie, P. (2019). Poverty eradication and food security through agriculture in Africa: Rethinking objectives and entry points. *Outlook on Agriculture*, 48(4), 309–315.
- Guo, Y., Zhou, Y., & Liu, Y. (2022). Targeted poverty alleviation and its practices in rural China: A case study of Fuping county, Hebei Province. *Journal of Rural Studies*, 93, 430–440.
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80.
- Harrison, R. L., Reilly, T. M., & Creswell, J. W. (2020). Methodological rigor in mixed methods: An application in management studies. *Journal of Mixed Methods Research*, 14(4), 473–495.
- Hermawan, A., Istiqomah, I., & Ahmad, A. A. (2021). The Effect of Village Funds on Rural Poverty: Empirical Evidence From Java Island. *ICORE*, 5(1).
- Indraswari, D. L. (2023). *Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/25/ironi-kemiskinan-wilayah-pesisir-yang-kaya-potensi-ekonomi-kelautan>

- Kamal, A. (2022). The Effect of Competence and Professional Skepticism on Fraud Detection Skills. *International Journal Of All Research Writings*, 4(2), 1–9.
- Kamal, A., Gustiningsih, D. A., & Habbe, A. H. (2019). The Factors of Fraud Trends in Public Sector in Makassar City. *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)*, 85–94.
- Kronauer, M. (2019). 'Social exclusion' and 'underclass'-new concepts for the analysis of poverty. In *Empirical poverty research in a comparative perspective* (pp. 51–76). Routledge.
- Leventi, C., Sutherland, H., & Tasseva, I. V. (2019). Improving poverty reduction in Europe: What works best where? *Journal of European Social Policy*, 29(1), 29–43.
- Moeis, F. R., Dartanto, T., Moeis, J. P., & Ikhsan, M. (2020). A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. *World Development Perspectives*, 20, 100261.
- Mora-Rivera, J., & García-Mora, F. (2021). Internet access and poverty reduction: Evidence from rural and urban Mexico. *Telecommunications Policy*, 45(2), 102076.
- Nawawi, M., Ali, A., Irawan, B., Ahmad, B., Mukramin, S., Marsuki, N. R., Umanailo, M. C. B., & Kaya, I. R. G. (2020). The village kalesang program as a poverty alleviation community. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 3103–3107.
- Normasyhuri, K., Suryanto, T., & Prayoga, R. (2022). Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Ekonomi Islam. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 18(2), 173–185.
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166.
- Oktavia, R., & Wihastuti, L. (2020). Village Fund and its Impact on Poverty Alleviation in Kulon Progo Regency. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 24(1), 79–94.
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 37.
- Parker, C., Scott, S., & Geddes, A. (2019). Snowball sampling. *SAGE Research Methods Foundations*.
- Pranoto, A., Widiyahseno, B., & Wahyuni Dj, E. (2022). Peran Pemerintah Desa Mewujudkan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3).
- Republik Indonesia. (2014). *UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

- Rusman, R., Budhi, S., & Jamaluddin, J. (2020). Effectiveness Of The Village Fund Allocation Management (Add) In Rural Development Of Bintang Ninggi li District South Teweh, North Barito Regency, Indonesia. *European Journal of Economic and Financial Research*.
- Salim, W., & Drenth, M. (2020). Local governance and access to urban services: political and social inclusion in Indonesia. *Governance for Urban Services: Access, Participation, Accountability, and Transparency*, 153–183.
- Seda, F. S. S. E., Kurniawan, K. N., & Pera, Y. H. T. (2023). Social Inclusion Challenges and the Future of Relational Wellbeing: The Case of Indonesia and South-Korea. *Social Indicators Research*, 165(1), 309–332.
- Sharma, D., & Kumar, N. (2022). Instruments Used in the Collection of Data in Research. *Available at SSRN 4138751*.
- Shaw, R. M., Howe, J., Beazer, J., & Carr, T. (2020). Ethics and positionality in qualitative research with vulnerable and marginal groups. *Qualitative Research*, 20(3), 277–293.
- Soratto, J., Pires, D. E. P. de, & Friese, S. (2020). Thematic content analysis using ATLAS. ti software: Potentialities for researchs in health. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73.
- Taruno, H. T. (2019). Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009–2018. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 4(2), 49–56.
- Yang, Y., de Sherbinin, A., & Liu, Y. (2020). China's poverty alleviation resettlement: Progress, problems and solutions. *Habitat International*, 98, 102135.
- Yanuar, A., Anwar, C., & Jokolelono, E. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Tengah 2015–2019. *Katalogis*, 9(3), 283–295.
- Zhou, D., Cai, K., & Zhong, S. (2021). A statistical measurement of poverty reduction effectiveness: Using China as an example. *Social Indicators Research*, 153, 39–64.